

Inovasi Digital untuk Efisiensi Birokrasi: Analisis Penerapan Aplikasi Lambarasa dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Online di Kabupaten Bima

^aYudhi Lestanata, ^aSadrul Imam, ^aHidayatullah, ^bHaeril

^aProgram Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

^bProgram Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Email: yudhi.lestanata27@gmail.com

Article Information

Submitted: 18 Mei 2024

Accepted: 28 Mei 2024

Online Publish: 28 Mei 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Aplikasi Lambarasa dalam meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penerbitan dokumen kependudukan secara online di Kabupaten Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis penerapan aplikasi Lambarasa di Kantor Dukcapil Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas, dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Lambarasa telah memberikan dampak positif dalam mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang menghambat efektivitas aplikasi, seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi dan akses internet yang tidak merata. Mayoritas masyarakat masih lebih memilih metode konvensional daripada memanfaatkan aplikasi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sosialisasi yang intensif dan terarah, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aplikasi Lambarasa dapat diadopsi lebih luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik serta mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bima.

Kata Kunci: *Inovasi Digital, Aplikasi Lambarasa, Penerbitan, Kependudukan*

Abstract

This study aims to evaluate the contribution of the Lambarasa Application in enhancing bureaucratic efficiency through the online issuance of civil documents in Bima Regency. The research methodology employed is a qualitative approach focusing on the analysis of the application of Lambarasa at the Civil Registration Office of Bima Regency. Data were collected through direct observation, interviews with officials, and analysis of relevant policy documents. The study's findings indicate that the Lambarasa Application has positively impacted the acceleration of administrative processes, reduction of bureaucratic burdens, and improvement of the efficiency and accuracy of civil data. However, the research also identifies several challenges that hinder the application's effectiveness, such as the limited public knowledge on how to use the application and uneven internet access. The majority of the population still prefers conventional methods over utilizing this application. To address these challenges, intensive and targeted socialization efforts, improvements in information technology infrastructure, and adequate technical support are necessary. With these measures, it is hoped that the Lambarasa application can be more widely adopted, thereby enhancing the efficiency and quality of public services and facilitating the processing of civil documents for the people of Bima Regency.

How to Cite

Yudhi Lestanata, Sadrul Imam, Hidayatullah, Haeril/Inovasi Digital untuk Efisiensi Birokrasi: Analisis Penerapan Aplikasi Lambarasa dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Online di Kabupaten Bima/Vol 5 No 2 (2024)

DOI
e-ISSN

<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.371>
2721-2246

Published by

Rifa Institute

Keywords: *Digital Innovation, Lambarasa Application, Issuance, Civil Registration.*

Pendahuluan

Di Indonesia, data kependudukan, baik dalam bentuk manual maupun online, memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat (Vázquez-López & Marey-Perez, 2021); (Maulana, 2020). Data kependudukan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah serta kegiatan sosial, ekonomi, dan politik (Ziemba & Papaj, 2012). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pentingnya data kependudukan online semakin terasa dalam mempermudah berbagai proses administrasi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat (Lytras & Şerban, 2020); (Firmandayu & Elfaki, 2023).

Salah satu manfaat utama dari data kependudukan online adalah mempermudah verifikasi identitas tanpa harus membawa KTP fisik (Koniyo, 2021); (Ila Farida & Dewi Ambarwati, 2023). Dengan adanya sistem digitalisasi, individu dapat dengan mudah memverifikasi identitas mereka secara online melalui berbagai platform yang terintegrasi dengan data kependudukan (Ingrams et al., 2020). Hal ini sangat menguntungkan terutama dalam situasi di mana membawa KTP fisik tidak praktis atau membutuhkan waktu yang lama (Li et al., 2021) (Firman et al., 2023).

Selain itu, keberadaan data kependudukan online juga mempermudah akses terhadap layanan publik (Ullah et al., 2022). Individu tidak perlu lagi datang secara langsung ke kantor pemerintah untuk mengurus berbagai administrasi, seperti pembuatan surat izin, pembuatan kartu keluarga, atau perubahan data kependudukan (Aprilia et al., 2023); (Alshehri et al., 2022). Dengan akses online, proses tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform digital yang telah tersedia (Haerofiatna & Chaidir, 2023).

Data kependudukan online juga memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi anggota keluarga (Rodriguez-Hevía et al., 2020). Dengan terhubungnya data kependudukan antara satu individu dengan individu lain dalam satu keluarga, memudahkan dalam memverifikasi status hubungan keluarga dan memperoleh informasi terkait data keluarga secara keseluruhan (Farida et al., 2020).

Kemajuan dalam teknologi juga telah memungkinkan adopsi KTP digital dan kartu keluarga digital. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membawa identitas dan informasi keluarga mereka tanpa harus membawa dokumen fisik yang rentan hilang atau rusak. Selain itu, dengan adanya KTP digital dan kartu keluarga digital, kebutuhan akan pencetakan dokumen fisik dapat dikurangi, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi (Japami & Eriyanti, 2019).

Perkembangan industri 4.0 juga berdampak pada pengelolaan data kependudukan. Proses administrasi yang dulunya memakan waktu dan tenaga, seperti antrian panjang di kantor pemerintah, kini dapat diatasi dengan kemudahan akses online (Farida et al., 2020). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi beban birokrasi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif (Tryanti & Frinaldi, 2019).

Demikian di Kabupaten Bima, aplikasi Lambarasa telah menjadi sebuah terobosan yang signifikan dalam mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan secara online di Kabupaten Bima. Sebagai salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, Lambarasa menyajikan solusi inovatif bagi masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan fitur-fitur canggihnya, aplikasi ini tidak hanya memungkinkan pengajuan dokumen secara online tetapi juga

mempercepat proses verifikasi dan pengeluaran dokumen secara langsung.

Aplikasi Lambarasa mewakili salah satu bentuk inovasi digital yang telah membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Lambarasa mampu mengotomatiskan sebagian besar proses administrasi kependudukan, mulai dari pengajuan hingga pengeluaran dokumen. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung memakan waktu dan tenaga, serta rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan demikian, Lambarasa tidak hanya mempercepat pelayanan kepada masyarakat tetapi juga mengoptimalkan kinerja birokrasi dengan meminimalkan waktu dan sumber daya yang diperlukan (Taufik, 2022).

Penggunaan Aplikasi Lambarasa sebagai platform untuk mengurus dokumen kependudukan secara online memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Bima. Pertama-tama, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang ke kantor pemerintah secara langsung, karena proses pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi dengan mudah. Selain itu, Lambarasa juga memfasilitasi proses verifikasi identitas secara lebih efisien, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penundaan dalam pengeluaran dokumen. Dengan demikian, Lambarasa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa hambatan dan dengan waktu yang lebih singkat (Chrismonita et al., 2020).

Aplikasi Lambarasa bukan hanya sekadar sebuah alat teknologi, tetapi juga merupakan simbol dari transformasi birokrasi menuju era digital di Kabupaten Bima. Dengan memanfaatkan potensi teknologi informasi secara maksimal, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sambil mengoptimalkan efisiensi operasional birokrasi (Prakoso, 2020). Selain itu, Lambarasa juga memberikan contoh bagi daerah lain tentang pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menyederhanakan proses administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, Aplikasi Lambarasa menjadi representasi dari upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam menghadapi tantangan era digital dengan solusi yang inovatif dan efektif (Rudiansyah et al., 2022).

Dengan demikian dalam penelitian ini, adapun pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana aplikasi Lambarasa dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi melalui penerbitan dokumen kependudukan secara online di Kabupaten Bima. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan antara lain: Bagaimana aplikasi ini mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan secara keseluruhan? Bagaimana tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa di Kabupaten Bima?

Urgensi penelitian ini sangatlah penting mengingat adopsi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin mendesak di era digital ini. Kabupaten Bima menjadi contoh yang menarik untuk diteliti karena implementasi aplikasi Lambarasa sebagai upaya penerbitan dokumen kependudukan secara online menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menganalisis efektivitas dan dampak aplikasi Lambarasa, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi inovasi digital dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di tingkat lokal, serta memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan pemerintah terkait pengembangan dan implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis terhadap penerapan Aplikasi Lambarasa dalam penerbitan

dokumen kependudukan online di Kantor Dukcapil Kabupaten Bima. Lokasi penelitian berada di Kantor Dukcapil tersebut, yang dipilih karena menjadi pusat administrasi kependudukan di Kabupaten Bima dan tempat utama di mana aplikasi Lambarasa diimplementasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung terhadap proses penerbitan dokumen kependudukan menggunakan aplikasi Lambarasa, wawancara dengan petugas Dukcapil, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur penerbitan dokumen. Sumber data yang digunakan berasal dari dokumen pemerintah terkait kebijakan dan prosedur penerbitan dokumen, serta dari publikasi yang relevan dengan inovasi digital dalam administrasi publik. Untuk meningkatkan keabsahan data, teknik triangulasi akan diterapkan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber. Terakhir, teknik analisis data model interaktif akan digunakan untuk menginterpretasikan data yang terkumpul dengan menggabungkan pemahaman peneliti dengan temuan empiris secara interaktif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh tentang dampak penerapan aplikasi Lambarasa dalam efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi dalam Meningkatkan Efisiensi Birokrasi

Peran teknologi informasi yang terintegrasi menjadi fondasi vital dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bima. Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan efisien dan transparan (Hartatik et al., 2022); (Nakhir Nafis Risqullah, 2019); (Darmawan et al., 2020). Dengan integrasi teknologi informasi, instansi pemerintah dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan mencapai hasil kinerja sesuai target yang ditetapkan (Wathani et al., 2024).

Digitalisasi layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima melalui Aplikasi Lambarasa telah menghadirkan inovasi yang signifikan dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Aplikasi Lambarasa, yang diluncurkan pada tahun 2020, merupakan salah satu layanan pengganti tatap muka yang memungkinkan pemohon atau warga untuk mengurus dokumen dari rumah dan mencetak sendiri Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Layanan ini menyediakan berbagai fitur penting yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan yang diperlukan. Fitur-fitur tersebut termasuk penerbitan KTP-El untuk berbagai keperluan seperti perekaman baru, penggantian karena hilang atau rusak, serta perubahan data seperti nama, alamat, atau status perkawinan. Proses penerbitan dilakukan tanpa perlu perubahan data pada elemen KTP-El, yang memastikan keakuratan dan keabsahan informasi. Dengan fitur-fitur ini, Lambarasa mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan, mengurangi waktu dan tenaga yang harus dihabiskan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan.

Selain penerbitan KTP-El, Aplikasi Lambarasa juga menyediakan layanan pengajuan akta kelahiran dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online, serta layanan terkait Kartu Keluarga (KK) seperti pembuatan KK baru, pemisahan KK, penambahan atau perubahan anggota, dan penerbitan KK yang rusak atau hilang. Semua layanan ini dapat diakses dan diurus secara online melalui aplikasi Lambarasa, memberikan kemudahan akses yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Bima. Dengan adanya layanan ini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, yang tidak hanya menghemat waktu dan tenaga tetapi juga mengurangi beban administratif yang harus

ditangani oleh staf Dukcapil. Hal ini sangat penting terutama di masa pandemi, di mana mengurangi kontak langsung dan pertemuan fisik menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus.

Adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Lambarasa juga membawa manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Proses layanan yang dipercepat dan transparansi yang meningkat memungkinkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas. Dengan adanya sistem digital ini, data kependudukan dapat diolah dan disimpan dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan dan duplikasi. Sistem ini juga memungkinkan pelacakan dan pemantauan proses pengurusan dokumen secara real-time, sehingga mempermudah evaluasi dan perbaikan layanan. Transparansi yang meningkat juga memastikan bahwa masyarakat dapat memantau sendiri proses pengurusan dokumen mereka, memberikan kepercayaan lebih terhadap instansi pemerintah.

Dengan demikian, kebijakan digitalisasi layanan kependudukan melalui Aplikasi Lambarasa tidak hanya mengubah cara tradisional dalam pengelolaan administrasi kependudukan, tetapi juga membawa dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Lambarasa memberikan solusi yang komprehensif untuk berbagai keperluan dokumen kependudukan, memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Keberhasilan Lambarasa dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam layanan kependudukan menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui digitalisasi.

Adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan juga meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Proses layanan yang dipercepat dan transparansi yang meningkat memungkinkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas. Selain itu, Lambarasa memastikan keakuratan dan keabsahan informasi dalam dokumen kependudukan yang dikeluarkan. Dengan adanya Aplikasi Lambarasa, masyarakat Kabupaten Bima dapat merasakan manfaat nyata dari efisiensi birokrasi yang tercipta. Mereka dapat mengurus dokumen kependudukan dengan mudah melalui perangkat elektronik mereka, menghemat waktu dan tenaga, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi Aplikasi Lambarasa dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima sangatlah penting. Melalui integrasi teknologi informasi dan digitalisasi layanan, aplikasi ini membawa perubahan positif dalam cara instansi pemerintah mengelola administrasi kependudukan dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Diharapkan pengembangan lebih lanjut pada aplikasi ini dapat terus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik di Kabupaten Bima, memberikan dampak positif yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

Tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa

Tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa di Kabupaten Bima merupakan sebuah permasalahan yang memerlukan pemahaman mendalam dan solusi yang tepat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengakses aplikasi tersebut. Meskipun Lambarasa telah menjadi inovasi digital yang signifikan dalam layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), namun masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi tersebut. Minimnya pengetahuan ini menjadi hambatan dalam memanfaatkan potensi penuh dari

aplikasi Lambarasa dalam mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan dokumen kependudukan.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Bima masih lebih memilih untuk mengantri di kantor Dukcapil daripada menggunakan aplikasi Lambarasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada alternatif yang lebih efisien dan mudah, namun masih ada ketidakpercayaan atau keengganan untuk beralih ke cara baru yang ditawarkan oleh teknologi. Mungkin ada aspek kebiasaan atau ketidakpastian mengenai keamanan dan keandalan aplikasi yang membuat sebagian masyarakat masih memilih cara konvensional.

Selain itu, fenomena bahwa sebagian masyarakat rela melakukan perjalanan jarak jauh hingga 120 kilometer untuk mengurus dokumen secara konvensional daripada menggunakan aplikasi menunjukkan adanya kesenjangan atau kekurangan dalam sosialisasi dan promosi aplikasi Lambarasa. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat adopsi dan penerapan aplikasi di tingkat masyarakat.

Kelemahan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentang aplikasi Lambarasa menjadi tantangan lain dalam efektivitas penerapannya. Sosialisasi yang kurang memadai dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan keberadaan dan manfaat aplikasi tersebut. Penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa sosialisasi yang baik tidak hanya berkaitan dengan memperkenalkan aplikasi kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman yang cukup tentang cara penggunaannya dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut.

Selain dari sisi pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tantangan efektivitas lainnya adalah adanya kemungkinan adanya hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi Lambarasa. Misalnya, mungkin ada kendala dalam akses internet di beberapa daerah, yang dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan aplikasi secara lancar. Selain itu, mungkin juga ada masalah terkait keamanan data atau privasi yang membuat sebagian masyarakat merasa ragu untuk menggunakan aplikasi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah meningkatkan kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Pemerintah daerah perlu melakukan kampanye sosialisasi yang menyeluruh dan konsisten, melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa lokal. Sosialisasi yang lebih personal dan interaktif, seperti workshop atau pelatihan langsung tentang penggunaan aplikasi, juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan Lambarasa.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Bima cukup mendukung untuk mendukung penggunaan aplikasi secara luas. Ini termasuk memastikan ketersediaan akses internet yang memadai di seluruh wilayah, serta menyediakan dukungan teknis yang memadai bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi.

Kemudian, penting memperbaiki dan memperkuat layanan dukungan pelanggan atau helpdesk untuk pengguna aplikasi juga dapat membantu mengatasi hambatan teknis yang mungkin muncul. Dengan menyediakan bantuan teknis yang mudah diakses dan responsif, masyarakat akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi dan lebih mungkin untuk mengatasi hambatan teknis yang mereka hadapi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi Lambarasa. Misalnya, pemerintah daerah dapat memberikan diskon atau kemudahan lainnya bagi warga yang menggunakan aplikasi untuk mengurus dokumen kependudukan mereka. Ini dapat menjadi insentif yang efektif untuk mendorong adopsi aplikasi oleh masyarakat. Dengan melakukan upaya-upaya ini secara bersama-sama,

diharapkan tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa di Kabupaten Bima dapat diatasi dengan lebih baik. Penggunaan aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Aplikasi Lambarasa berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima, ada beberapa tantangan yang menghambat efektivitas penerapannya. Aplikasi ini telah membawa inovasi digital penting dalam layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan akses online untuk penerbitan dokumen kependudukan, namun minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan aplikasi menjadi hambatan utama. Mayoritas masyarakat masih lebih memilih metode konvensional, seperti mengantri di kantor Dukcapil atau melakukan perjalanan jauh, daripada memanfaatkan aplikasi. Hal ini mencerminkan kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Daerah mengenai manfaat dan cara penggunaan Lambarasa. Selain itu, kendala teknis seperti akses internet yang tidak merata dan kekhawatiran tentang keamanan data juga mempengaruhi adopsi aplikasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kampanye sosialisasi yang intensif dan terarah, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aplikasi Lambarasa dapat diadopsi lebih luas, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bima.

BIBLIOGRAFI

- Alshehri, A., Alharbi, S., Khayyat, M., & Aboulola, O. (2022). *Global E-government Trends , Challenges and Opportunities*. January. <https://doi.org/10.18421/SAR44>
- Aprilia, R., Rochimin, P., & Oktafia, R. (2023). *Implementasi klampid new generation dalam mendukung tertib administrasi kependudukan untuk kesejahteraan masyarakat*. 25(2), 307–318.
- Chrismonita, V. N., Dewi, D. A. S., Suharso, S., & Budiharto, B. (2020). Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Borobudur Law Review*, 2(2), 64–89. <https://doi.org/10.31603/burrev.3917>
- Darmawan, A. K., Siahaan, D. O., Susanto, T. D., Walid, M., Umam, B. A., & Hidayanto, A. N. (2020). Identifying the Differing Service Maturity Levels of Mobile-based Smart Regency with e-Government Adoption Model (GAM) framework. *7th International Conference on ICT for Smart Society: AIoT for Smart Society, ICISS 2020 - Proceeding, November*. <https://doi.org/10.1109/ICISS50791.2020.9307540>
- Farida, I., Lampung, U. B., Setiawan, R., Maryatmi, A. S., & Juwita, N. (2020). The Implementation of E-Government in the Industrial Revolution Era 4.0 in Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 22(2), 340–346.
- Firman, F., Sahrul, S., & Ramadoan, S. (2023). Analysis of Efforts in the Development of Local Government: E-Government and Public Service Management. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 25–36.
- Firmandayu, N., & Elfaki, K. E. (2023). The Electronic Government Policy-Based Green Constitution Towards Good Governance. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 1(2), 108–121. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.11>
- Haerofiatna, H., & Chaidir, J. (2023). Regional Regulations: Implementation of Electronic-based Government System. *European Journal of Business and Innovation Research*, 11(3), 61–69. <https://doi.org/10.37745/ejbir.2013/vol11n36169>
- Hartatik, L., Saputra, M., & Hady, N. (2022). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem E-Siap Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. *Integralistik*, 33(2), 52–59. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i2.33543>
- Ila Farida, & Dewi Ambarwati. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan E-KTP Berbasis E-Adminduk. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 111–124. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2389>
- Ingrams, A., Manoharan, A., Schmidhuber, L., & Holzer, M. (2020). Stages and Determinants of E-Government Development: A Twelve-Year Longitudinal Study of Global Cities. *International Public Management Journal*, 23(6), 731–769. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987>
- Japami, W., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 75–85. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.22>
- Koniyo, M. H. (2021). Identification of components for evaluation e-government governance framework according to regional government characteristics. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1098(3), 032073. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/3/032073>
- Li, S., Wei, W., & Ma, M. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence from China. *IEEE Access*, 9, 94879–94888.

- <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3093981>
- Lytras, M. D., & Şerban, A. C. (2020). E-Government Insights to Smart Cities Research: European Union (EU) Study and the Role of Regulations. *IEEE Access*, 8, 65313–65326. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2982737>
- Maulana, R. Y. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government-Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. *Journal of Governance*, 5(1), 91–104. <https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317>
- Nakhir Nafis Risqullah. (2019). *Efektivitas pelayanan Berbasis Online Di Masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Prakoso, C. T. (2020). Inovasi Layanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital Government. *Jurnal Paradigma*, 9(2), 131–146.
- Rodriguez-Hevíá, L. F., Navío-Marco, J., & Ruiz-Gómez, L. M. (2020). Citizens' involvement in e-government in the European Union: The rising importance of the digital skills. *Sustainability (Switzerland)*, 12(17). <https://doi.org/10.3390/SU12176807>
- Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantín, K. (2022). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Kinerja*, 18(4), 513–520. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9837>
- Taufik, I. P. (2022). Strategi Penyebaran Informasi Persyaratan Penerbitan Dokumen Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. *Jurnal Registratie*, 4(1), 32–50.
- Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 424–435.
- Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Qaisar, Z. H., & Qian, N. (2022). The dynamic nexus of E-Government, and sustainable development: Moderating role of multi-dimensional regional integration index in Belt and Road partner countries. *Technology in Society*, 68(January), 101903. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101903>
- Vázquez-López, A., & Marey-Perez, M. (2021). Factors affecting e-government adoption by dairy farmers: A case study in the north-west of Spain. *Future Internet*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/fi13080206>
- Wathani, M. R., Kurniawan, M. Y., Rosadi, M. E., Raharjo, M. R., Hasbi, M., & Noor Asegaff, A. R. M. H. (2024). Pelatihan Aplikasi Adobatola (Administrasi Kependudukan Online Barito Kuala) Disdukcapil Marabahan. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 3(1), 39–46. <https://doi.org/10.37905/ljpm.v3i1.24013>
- Ziembra, E., & Papaj, T. (2012). E-government application at the regional level in Poland-The case of SEKAP. *2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2012*, 1047–1054.

Copyright holder:

Yudhi Lestanata, Sadrul Imam, Hidayatullah, Haeril (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

